

Daftar Pustaka

Buku

Dr. Aksi Sinurat, SH., M.Hum. Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di.

Kupang, 2023. <https://fh.undana.ac.id/wp-content/uploads/2023/07/Azas-azas-hukum-pidana-materil-di-Indonesia.pdf>.

Dr. I Made Wahyu Chandra Satriana, S.H., M., et all. Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justic. Bali: UDAYANA UNIVERSITY PRESS, 2021.

Dr. Shinta Agustina. Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Jakarta: Gramedia, 2016.

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. Buku Ajar Metodologi Penelitian. Cv Science Techno Direct, 2024.

Dr.Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M.Kn. Kajian Hukum Pidana Indonesia, 2016. [http://repo.jayabaya.ac.id/735/1/ Kajian Hukum Pidana Indonesia.pdf](http://repo.jayabaya.ac.id/735/1/Kajian%20Hukum%20Pidana%20Indonesia.pdf)

Dr Ishaq S.H., M.H. Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta Bndung, 2014. [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).

Dr. Lusia Sulastri, SH., MH. Pengaruh Obstruction of Justice yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap kepercayaan masyarakat pada sistem

peradilan di Indonesia. Surabaya: Pustaka Aksara, 2023

Dr. Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2020.

Prof. Dr. H. Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.

Dr. Munir. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Mustakim La Dee, S.H., M.H., C.L.A. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Medan: PT Media Pernerbit Indonesia, 2021.

Prof Moeljatno. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Yogyakarta: Bumi Syafridatati, and Prahara. *Sistem Peradilan Pidana Sistem*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022

Salah, Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawab Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1968.

Sugandhi. *KUHP Dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

Suyanto. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.

Wahyuni, Fitri. *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*, n.d.

Jurnal

Alfaro, Geraldo. "Tinjauan Yuridis Terhadap upaya menghalangi proses hukum (ibstruction of justice) oleh advokat dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi," no. 5 (2023).

Asrullah Dimas, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Atas Interpretasi Obstruction of Justice." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 2

(2021):308. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.10901>.

Wahyuningsih. "Legal Reconstruction of Corruption Crime As A Result of the Abuse of Authority Based on the Pancasila Justice Value" 7956 (2023): 245–50. <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2023.v06i04.008>.

Bahrn. "Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" 5, no. 3 (2021): 303–16.

Dimas, Asrullah. "Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Atas Interpretasi Obstruction of Justice." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 2 (2021): 308. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.10901>.

Fachriza, Faris. "Obstruction of justice dalam upaya penegak hukum" 25, no. 1 (2024): 110–23.

Faisal. "Penegakan Hukum Obstruction Of Justice Terhadap Proses penyidikan Kepolisian," 2024.

Fernando, Youngky. "Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Versus Deelneming Delicten / Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana" 1, no. 1 (2023): 57–71.

Fuady., Dr. Munir. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Fauzan, Rahul. "Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pada Obstruction Of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." 5 (2023): 891–901. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.3027>

Gareda, Markhy S. "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21UU NO. 31 Tahun 1999 Juncto UU NO. 20

Tahun 2001” IV, no. 1 (2015): 134–42

Kartika Sari, Dkk. “Eksistensi Teori Pembuktian Positif Wettelijk Bewijstheorie Dalam Pembuktian Perkara Perdata.” *Jurnal Akses* 12, no. 2 (2020): 132–40.

Kukuh, and et all Indri Hapsari. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 330. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>.

Lartifa. “Teori-Teori Pertanggungjawaban Hukum,” 2021, 185–86.

Lubis, Fauziah, and Juliana P C Sinaga. “Analisis Obstruction Of Justice Dalam 57 Perspektif Hukum Pidana” 6, no. 2 (2024): 65916601.

Mayrachelia, Difia Setyo, and Irma Cahyaningtyas. “Karakteristik Pembuatan Advokat Yang Termasuk Tindak Pidana Obstruction of Justice Berdasarkan Ketentuan Pidana” 4 (2022): 121–32.

Moh. Anton Suryadi. “Analisa Perbuatan Menghalangi Proses Penyidikan, Penuntutan, Dan Peradilan (Obstruction of Justice) Dalam Sistem Peradilan di Indonesia” 3, no. 02 (2023): Hlm. 6.

Nurillah, Esa, Anak Agung, Sagung Laksmi, and I Made Minggu Widyantara. “Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Yang Menghalangi Penyidikan (Obstraction of Justice). Vol. 5, 2023.

M Rahul Fauzan Saragih, Bakti Jaya, Negara Pohan, Tetty Marlina Tarigan, Program Studi, and Hukum Ekonomi. “As- Syar ’ I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pada

Obstruction Of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi As- Syar ’

I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga” 5 (2023): 891–901.

<https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.3027>.

Mansyah, Muh Sutri, La Ode, and Bunga Ali. “Menghilangkan Alat Bukti Oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Obstruction of Justice Eliminating Evidence by Corruption Investigators as Obstruction of Justice Efforts” 18, no. 20 (2019): 877–84.

Ridha, Riza akbar. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perintangan Dalam Proses Penyidikan (,” no. 31 (2024): 1–8.

Risqi. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. sleman: CV budi utama, 2020.<https://books.google.co.id/books?id=PlxPEQAAQBAJ&lpg=PP1&ots=Yr XDi8Co0Q&dq=tindak pidana korupsi&lr&hl=id&pg=PA1#v=onepage&q=tindak pidana korupsi&f=false>.

Riza akbar ridha, Dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perintangan Dalam Proses Penyidikan (,” no. 31 (2024): 1–8.

Roghib, Ahmad. “Analisis Yuridis Hak Imunitas Advokat Dalam Tindak Pidana Obstruction of Justice Tesis,” 2024.

Rumondang. “Kejagung: Direktur JakTV Tahanan Kota Dipasangi Detektor, Istri Jadi Jaminan.” detikNews, 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7889691/kejagung-direktur-jaktv-tahanan-kota-dipasangi-detektor-istri->

jadi-jaminan.

Salim, Andre. "Prosedur Penetapan Tersangka yang menjadi objek permohonan peradilan," no. 2 (2023): 19–28.

Satino. "Freedom and The Role of The Press on Law Enforcement Reviewed in The Perspective of Law Number: 40 Of 1999, Concerning The Press." *Journal Research of Social Science, Economics, and Management* 1, no. 3 (2021): 255–70.

<https://doi.org/10.59141/jrssem.v1i3.27>

Sucy, Cyta, Marrismawati Arini, Asriyani Muhammad, and Rusdi Suprpto.

"Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Tantangan Dan Solusi Menuju Keadilan Efektif" 11, no. 2018 (2024): 377–82.

Syofyan, Syofirman, Sucy Delyarahmi, Fakultas Hukum, and Universitas Andalas. "Problematika penegakan hukum delik obstruction of justice dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi" 6, no. 4 (2023): 516–40.

Tandean, Vanesa. "Penerapan pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam putusan hakim" IX, no. 2 (2020): 5–16.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, 2014.

Pemerintahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Internet

Kejaksaan Republik. “Sidang Perintangan Perkara Timah, Impor Gula, Dan Ekspor CPO Bongkar Skenario Operasi Media Dan Penggiringan Opini.”
story.kejaksaan.go.id, 2026. <https://story.kejaksaan.go.id/hot-issue/sidang-perintangan-perkara-timah-impor-gula-dan-ekspor-cpo-bongkar-skenario-operasi-media-dan-penggiringan-opini-mvk.html?screen=1>.

Kejaksaan Republik. “Sidang Perintangan Perkara Timah, Impor Gula, Dan Ekspor CPO Bongkar Skenario Operasi Media Dan Penggiringan Opini.”
story.kejaksaan.go.id, 2026. <https://story.kejaksaan.go.id/hot-issue/sidang-perintangan-perkara-timah-impor-gula-dan-ekspor-cpo-bongkar-skenario-operasi-media-dan-penggiringan-opini-mvk.html?screen=1>.

Sidang Perkara Perintangan Perkara, JPU Tunjukkan Bukti Kerja Sama Pembuatan Konten Negatif Antara Marcella Santoso Dan Terdakwa,” n.d.
<https://story.kejaksaan.go.id/berita-utama/sidang-perkara-perintangan-perkara-jpu-tunjukkan-bukti-kerja-sama-pembuatan-konten-negatif-antara-marcella-santoso-dan-terdakwa-mvk.html?screen=1>.

Kejaksaan Republik. “Sidang Perintangan Perkara Timah, Impor Gula, Dan Ekspor CPO Bongkar Skenario Operasi Media Dan Penggiringan Opini.”

story.kejaksaan.go.id, 2026. <https://story.kejaksaan.go.id/hot-issue/sidang-perintangan-perkara-timah-impor-gula-dan-ekspor-cpo-bongkar-skenario-operasi-media-dan-penggiringan-opini-mvk.html?screen=1>

Sidang Perkara Perintangan Perkara, JPU Tunjukkan Bukti Kerja Sama Pembuatan Konten Negatif Antara Marcella Santoso Dan Terdakwa, n.d. <https://story.kejaksaan.go.id/berita-utama/sidang-perkara-perintangan-perkara-jpu-tunjukkan-bukti-kerja-sama-pembuatan-konten-negatif-antara-marcella-santoso-dan-terdakwa-mvk.html?screen=1>

Sidang Perkara Perintangan Perkara, JPU Tunjukkan Bukti Kerja Sama Pembuatan Konten Negatif Antara Marcella Santoso Dan Terdakwa, n.d. <https://story.kejaksaan.go.id/berita-utama/sidang-perkara-perintangan-perkara-jpu-tunjukkan-bukti-kerja-sama-pembuatan-konten-negatif-antara-marcella-santoso-dan-terdakwa-mvk.html?screen=1>

Novianti. “Penggunaan Pasal Perintangan Penyidikan Terhadap Direktur JAK TV Apakah Tepat?” Kompas.com, 2025.

<https://share.google/OxHcGBVxbkkJSnjeQ>.

Nuralam, Candra Yuri. “Sidang Perkara Obstruction of Justice, Ahli Jelaskan Penerapan Pasal 21 UU Tipikor.” metrotv, 2026.

<https://www.metrotvnews.com/read/bw6C2xqV-sidang-perkara-obstruction-of-justice-ahli-jelaskan-penerapan-pasal-21-uu-tipikor> .

Sidang Perkara Obstruction of Justice, Ahli Jelaskan Soal Peran Pers. metrotv, 2026.

<https://www.metrotvnews.com/read/NleC9Gv1-sidang-perkara-obstruction-of-justice-ahli-jelaskan-soal-peran-pers>.

Nuralam, Candra Yuri. “Sidang Perkara Obstruction of Justice, Ahli Jelaskan Penerapan Pasal 21 UU Tipikor.” metrotv, 2026.

<https://www.metrotvnews.com/read/bw6C2xqV-sidang-perkara-obstruction-of-justice-ahli-jelaskan-penerapan-pasal-21-uu-tipikor>

Setyaningrum, Puspasari. “Marcella Santoso Akhirnya Minta Maaf, Akui Telah Sebarkan Konten Negatif Mengenai Kejaksaan.” Kompas.com, 2025.

<https://www.kompas.com/jawa-tengah/read/2025/06/17/182600088/marcella-santoso-akhirnya-minta-maaf-akui-telah-sebarkan-konten>.

Renata. “Bunyi pasal 221 kuhp tentang obstruction of justice.” Hukum Online.com, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-221-kuhp-tentang-obstruction-of-justice-i-lt65e5c883364d3/>.

Rumondang. “Kejagung: SSS JakTV Tahanan Kota Dipasangi Detektor, Istri Jadi Jaminan.” detikNews, 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7889691/kejagung-direktur-jaktv-tahanan-kota-dipasangi-detektor-istri-jadi-jaminan>

Ricardo. “Kubu Tian Bahtiar Merasa Tuduhan Perintangan Penyidikan Tidak Terbukti Di Persidangan.” jpnn.com, 2025.

<https://www.jpnn.com/news/kubu-tian-bahtiar-merasa-tuduhan-perintangan-penyidikan-tidak-terbukti-di-persidangan>.

Poting, Moh. “Tian Bahtiar Sesalkan Dakwaan Pembuatan Berita Negatif Perkara

Korupsi.” AntaraMaluku, 2026.

<https://ambon.antaranews.com/berita/318206/tian-bahtiar-sesalkan-dakwaan-pembuatan-berita-negatif-perkara-korupsi>.

Willa. “Pengertian, Kedudukan, Dan Unsur Obstruction of Justice

Dalam Proses Hukum.” Hukum Online.com, 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian--kedudukan--dan-unsur- obstruction-of-justice-dalam-proses-hukum-1t634e124548acb/>.

Yati, Rusmi. “Tian Bahtiar Dalam Pledoi: Tidak Ada Bukti Saya Lakukan Tindak

Pidana, Hanya Dikriminalisasi Berdasarkan Persepsi Bukan Fakta,”

2026. <https://mediacitranusantara.com/2026/02/24/tian-bahtiar-dalam-pledoi-tidak-ada-bukti-saya-lakukan-tindak-pidana-hanya-dikriminalisasi-berdasarkan-persepsi-bukan-fakta/>.

